OPEN ACCESS
Global Journal of Interdisciplinary Research and Innovation (GJIRI) | Vol. 1 No. 2 (2026)
E-ISSN:
Research

Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam di Era Kontemporer: Integrasi Keilmuan, Moderasi Beragama, dan Tantangan Kecerdasan Artifisial

Aprilia Ayu Pratiwi [1*], Aulia Nurul Fahriani [2], Zidan Arif Muzhaffar [3], Taufiqurrahman [4]
[1-4] Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia
Email: apriliafarmasi@gmail.com, fahrianiul@gmail.com, arifzidan561@gmail.com, taufiqrm27@gmail.com

Abstract
Islamic Religious Education (IRE) faces various contemporary challenges related to the dichotomy of knowledge, radicalism and intolerance, the disruption caused by artificial intelligence (AI), the commodification of education, and the dynamics of curriculum policy and teacher professionalism. This paper aims to critically analyze these issues and formulate strategies for transforming IRE into an integrated, moderate, and adaptive educational practice that responds to developments in science and technology. This paper employs a qualitative approach using the library research method. Data were collected through a review of relevant literature and analyzed using content analysis, involving thematic identification, critical interpretation, and conceptual synthesis. The discussion indicates that the challenges facing IRE extend beyond limitations in teaching methods to include the separation of knowledge paradigms, changes in religious authority in digital spaces, pragmatic educational orientations, and structural issues in educational policy and teacher management. In response, this paper proposes the reconstruction of IRE through an integration-interconnection paradigm that connects revelation, science, technology, and social realities; the strengthening of religious moderation through the internalization of the wasathiyyah principle; and the development of critical digital pedagogy that emphasizes AI literacy, the verification of religious information, and ethical responsibility. These transformative efforts need to be supported by adaptive curriculum policies, improvements in teachers' professional competence and welfare, and a renewed emphasis on spirituality and moral character formation. Therefore, IRE should be developed as an educational process that not only promotes knowledge acquisition but also fosters character development, social responsibility, and the ability to navigate contemporary changes in accordance with Islamic values.

Keywords: *Islamic Religious Education; integration-interconnection; religious moderation; artificial intelligence; curriculum reconstruction.*

Abstrak
Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi berbagai tantangan kontemporer yang berkaitan dengan dikotomi keilmuan, radikalisme dan intoleransi, disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komodifikasi pendidikan, serta dinamika kebijakan kurikulum dan profesionalisme guru. Makalah ini bertujuan menganalisis secara kritis berbagai persoalan tersebut sekaligus merumuskan strategi transformasi PAI yang integratif, moderat, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan literatur yang relevan dan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) melalui identifikasi tema, interpretasi kritis, dan sintesis konseptual. Pembahasan menunjukkan bahwa persoalan PAI tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan metode pembelajaran, tetapi juga dengan keterpisahan paradigma keilmuan, perubahan otoritas keagamaan di ruang digital, orientasi pendidikan yang pragmatis, serta persoalan struktural dalam kebijakan dan pengelolaan pendidik. Sebagai respons, makalah ini menawarkan rekonstruksi PAI melalui paradigma integrasi-interkoneksi yang menghubungkan wahyu, sains, teknologi, dan realitas sosial; penguatan moderasi beragama melalui internalisasi nilai wasathiyyah; serta pengembangan pedagogi digital kritis yang menekankan literasi AI, verifikasi informasi keagamaan, dan tanggung jawab etis. Transformasi tersebut perlu didukung oleh kebijakan kurikulum yang adaptif, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta penguatan orientasi spiritual dan pembentukan akhlak. Dengan demikian, PAI perlu dikembangkan sebagai proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, tanggung jawab sosial, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Pendidikan Agama Islam; integrasi-interkoneksi; moderasi beragama; kecerdasan buatan; rekonstruksi kurikulum.*

Copyright: © 2026 by the authors.
This is an open access article
distributed under the terms and conditions of the CC BY 4.0.

1. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) menduduki posisi strategis sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter, moralitas, serta pandangan dunia (worldview) umat Islam. Sebagai instrumen tranformasi keilmuan dan nilai-nilai Ilahiah, PAI dituntut tidak sekadar bertindak sebagai transmisi doktrin ritual-formalistik yang kaku, melainkan harus mampu menjadi kekuatan profetik yang membebaskan, mencerahkan, dan memberikan solusi atas krisis kemanusiaan kontemporer (Azra, 2020: 45; Nasr, 2018: 89). Namun, dalam realitas abad ke-21 yang sarat dengan disrupsi teknologi, globalisasi, dan dinamika sosio-politik yang sangat cepat, Pendidikan Agama Islam dihadapkan pada jalinan kompleksitas isu-isu kritis yang mengancam efektivitas dan relevansi keilmuannya.

Salah satu isu mendasar yang secara historis masih membayangi epistemologi PAI adalah dikotomi keilmuan-sebuah pemisahan tajam antara ilmu-ilmu agama (al-ulum al-diniyyah) dan ilmu-ilmu umum atau sains (al-ulum al-aqliyyah). Pemisahan ini melahirkan dualisme pendidikan yang mengalienasi peserta didik dari pemahaman sains beretika dan agama yang rasional (Madjid, 2019: 67; Naim, 2021: 82). Akibat dikotomi ini, PAI sering kali diajarkan secara terisolasi dari perkembangan teknologi, ekonomi, sosiologi, dan ekologi modern. Keterpisahan ini menyebabkan lahirnya cara pandang terbelah (split personality) di mana ajaran agama dipersepsikan sebatas ibadah ritual di masjid, sementara sains dan teknologi dijalankan tanpa bimbingan etika nilai Ketuhanan (Abdullah, 2020: 112).

Di samping krisis epistemologis, lanskap sosio-religius Indonesia dan dunia global terus diuji oleh menguatnya arus eksklusivisme, intoleransi, dan radikalisme beragama. Lembaga pendidikan formal kerap kali disusupi oleh narasi-narasi keagamaan yang rigid, tekstualis, dan anti-keberagaman (Hasan, 2020: 143; Arifianto, 2019: 78). Ketika pembelajaran PAI di sekolah masih menerapkan pedagogi konvensional yang berpusat pada penanaman doktrin kognitif-dogmatis tanpa mengasah penalaran kritis (critical thinking), peserta didik menjadi sangat rentan terpapar paham ekstremisme yang tersebar pesat di ruang publik (Muqoyyidin, 2022: 115). Hal ini menuntut reposisi PAI sebagai garda terdepan penguatan Moderasi Beragama (wasathiyyah) yang inklusif, humanistis, dan ramah terhadap keberagaman bangsa.

Tantangan ini kian terakselerasi dengan lahirnya era Disrupsi Digital, Society 5.0, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hadirnya platform media sosial, algoritma mesin pencari, dan chatbot berbasis Large Language Models (LLM) telah mengubah pola konstruksi keagamaan generasi muda secara radikal (Syarif, 2023: 54; Campbell, 2021: 102). Otoritas keagamaan tradisional yang selama ini dipegang oleh para ulama, kiai, dan guru PAI yang menguasai sanad keilmuan tergeser oleh figur 'Ustaz Algoritma' dan penceramah populer digital yang menjual narasi instan dan kontroversial. Generasi Z dan Alpha cenderung menjadikan mesin pencari dan AI sebagai rujukan utama hukum Islam tanpa verifikasi metodologi keilmuan (usul al-fiqh) yang benar (Fahrudin, 2022: 198). Tanpa adanya pendampingan pedagogi digital kritis, PAI berisiko mengalami pendangkalan makna dan disorientasi spiritual.

Tidak kalah krusial, fenomena komodifikasi dan sekularisasi terselubung dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam turut melukai ruh spiritualitas dan keikhlasan pendidikan. Tarikan arus Neoliberalisme telah mengubah lembaga pendidikan Islam favorit menjadi komoditas bisnis berbiaya tinggi yang memperlebar jurang stratifikasi sosial (Rahman, 2021: 177; Apple, 2019: 134). Orientasi PAI di sekolah sering kali terdegradasi menjadi sekadar mata pelajaran mekanis untuk memenuhi kelulusan tes administratif ketimbang internalisasi etika (akhlak al-karimah). Diperberat dengan dinamika kebijakan kurikulum nasional yang berubah-ubah serta isu kesejahteraan guru PAI yang masih terabaikan, rekonstruksi PAI secara sistemik menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada analisis konseptual dan kritis terhadap berbagai isu kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), meliputi dikotomi keilmuan, moderasi beragama, disrupsi kecerdasan buatan, komodifikasi pendidikan Islam, serta kebijakan kurikulum dan profesionalisme guru. Data penelitian bersumber dari literatur yang relevan, seperti buku akademik, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas epistemologi pendidikan Islam, integrasi-interkoneksi keilmuan, moderasi beragama, teknologi pendidikan, serta kebijakan pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pemilihan, dan



pengkajian sumber pustaka berdasarkan relevansinya dengan fokus pembahasan. Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahapan identifikasi gagasan utama, pengelompokan tema, interpretasi kritis, dan sintesis konseptual. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, keterkaitan antarisu, serta alternatif strategi transformasi PAI dalam menghadapi tantangan kontemporer. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan pembelajaran, kurikulum, dan tata kelola pendidikan Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Problematika Epistemologis: Dikotomi Ilmu Agama dan Ilmu Umum

1. Genealogi Historis Dikotomi Keilmuan dalam Dunia Islam

Problematika dikotomi antara ilmu agama (*al-ulum al-diniyyah*) dan ilmu umum/sains (*al-ulum al-aqliyyah*) merupakan trauma sejarah panjang yang membelenggu peradaban Islam sejak berabad-abad lalu. Pada era kejayaan Abad Pertengahan (abad ke-8 hingga ke-13 M), peradaban Islam mencapai puncak keemasan intelektual (*The Golden Age of Islam*) justru karena diterapkannya paradigma keilmuan yang holistik dan tak tersekat. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina (*Avicenna*), Al-Biruni, Ibn al-Haytham, dan Ibnu Rushd (*Averroes*) adalah wujud nyata figur *polymath* Muslim yang menguasai Al-Qur'an dan Hadits sekaligus pakar utama dalam bidang kedokteran, astronomi, fisika, dan filsafat (Nasr, 2018: 112; Madjid, 2019: 67). Bagi mereka, meneliti hukum-hukum alam (*ayat kauniyyah*) adalah bagian tak terpisahkan dari pengabdian ketuhanan dan pemahaman terhadap wahyu terulis (*ayat qawliyyah*).

Namun, pasca-kemunduran politik Baghdad akibat invasi Mongol (1258 M) dan menguatnya kecenderungan ortodoksi yang menutup pintu ijtihad, terjadi penyempitan makna ilmu dalam tradisi Islam. Kata 'ilmu' (*al-'ilm*) yang dalam Al-Qur'an mencakup seluruh pengetahuan tentang penciptaan, perlahan-lahan direduksi hanya sebatas ilmu-ilmu Fiqh, Kalam, dan Tasawuf (Rahman, 2021: 88). Kondisi ini diperparah secara masif pada abad ke-19 dan ke-20 ketika hegemoni kolonialisme Barat merambah dunia Muslim. Pemerintah kolonial memaksakan dualisme pendidikan: sekolah-sekolah sekuler modern didirikan untuk mencetak tenaga birokrasi yang menguasai sains Barat tanpa nilai moral agama, sementara lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah terpojok dan mengurung diri pada pengajaran teks-teks keagamaan klasik yang puritan (Azra, 2020: 52; Naim, 2021: 85).

2. Implikasi Terhadap *Structure of Knowledge* dan Kurikulum PAI

Warisan dikotomi historis tersebut berdampak sistemik pada struktur kurikulum PAI di lembaga pendidikan formal hingga hari ini. Dalam struktur kurikulum nasional, PAI ditempatkan sebagai subjek terisolasi yang dialokasikan jam pelajaran sangat terbatas (umumnya 2–3 jam pelajaran per minggu). Materi PAI dipadatkan ke dalam lima sub-komponen utama: Al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Peradaban Islam (SPI). Sayangnya, kelima sub-komponen ini sering kali diajarkan secara dogmatis-tekstual, terpisah dari fenomena sains empiris dan realitas sosial-ekonomi kontemporer (Abdullah, 2020: 118).

Sebaliknya, mata pelajaran umum seperti fisika, biologi, kimia, matematika, dan sosiologi diajarkan dengan paradigma sekuler-positivistik yang menanggalkan peran Ilahiah dalam mekanika alam semesta. Keterpisahan ini membentuk krisis kesadaran epistemologis pada diri peserta didik, yang mewujud dalam bentuk pola pikir terbelah (*split personality*):

a. Anomali Karakter: Peserta didik memandang ajaran agama sebatas formalitas ritual eskatologis di masjid atau ruang kelas PAI, namun merasa bebas dari etika agama ketika beraktivitas di laboratorium sains, media sosial, atau kehidupan profesional sosial-ekonomi (Naim, 2021: 91).

b. Kemandulan Solusi Keagamaan: Ketika masyarakat menghadapi krisis global seperti pandemi, krisis iklim, disrupsi AI, atau ketimpangan ekonomi, pemikir dan lulusan PAI sering kali gagal memberikan fatwa atau pemikiran yang solutif karena tidak memahami metodologi sains modern yang mendasari masalah tersebut (Abdullah, 2020: 122).

3. Kritik Epistemologis dan Tawaran Paradigma Integrasi-Interkoneksi

Merespons bahaya dikotomi ini, para cendekiawan Muslim modern melancarkan kritik epistemologis dan menawarkan formulasi integrasi keilmuan. Kuntowijoyo (2018: 102) mencetuskan gagasan 'Pengilmuan Islam' (*Islamic Science*), yaitu gerakan epistemologis yang mengubah arah pemikiran Islam dari sekadar teks normatif menuju teks empiris-rasional melalui dua pendekatan: Inspirasi Al-Qur'an dalam membangun teori sains, dan Objektifikasi Islam agar nilai-nilai keagamaan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh manusia (*rahmatan lil 'alamin*) tanpa memandang latar belakang agama.

Sementara itu, M. Amin Abdullah (2020: 125) menawarkan paradigma 'Integrasi-Interkoneksi' yang divisualisasikan dalam skema 'Jaring Laba-Laba Keilmuan' (*Spider Web*). Dalam paradigma ini, keilmuan tidak lagi disusun secara hierarkis-dikotomis, melainkan secara dialogis-interdisipliner yang menghubungkan tiga domain utama:

a. *Hadarah al-Nass* (Peradaban Teks/Wahyu): Berbasis Al-Qur'an, Hadis, dan turas keagamaan klasik.

b. *Hadarah al-Kashf* (Peradaban Intuitif/Spiritual): Berbasis etika, tasawuf, dan kebersihan mata hati.

c. *Hadarah al-'Ilm* (Peradaban Sains/Rasional): Berbasis metode ilmiah, observasi empiris, dan teknologi modern.

Dalam paradigma Integrasi-Interkoneksi, PAI tidak boleh lagi merasa jumawa berdiri sendiri atau sebaliknya terisolasi dari sains. PAI harus bersikap terbuka (*inclusive*), mampu menyapa dan disapa oleh ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, serta humaniora demi menjawab kompleksitas krisis kemanusiaan abad ke-21.

B. Tantangan Sosio-Religius: Radikalisme, Intoleransi, dan Moderasi Beragama

1. Penetrasi Ideologi Eksklusif dan Ekstremisme di Sekolah

Isu kritis yang sangat mendesak dalam lanskap sosial-keagamaan Indonesia adalah maraknya penetrasi ideologi eksklusivisme, intoleransi, dan radikalisme beragama di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Berbagai penelitian empiris yang dilakukan oleh Setara Institute, PPIM UIN Jakarta, dan LSI merekam kecenderungan yang mengkhawatirkan: sebagian peserta didik dan pendidik menunjukkan sikap enggan menerima pemimpin dari latar belakang agama lain, menolak interaksi sosial dengan kelompok berbeda mazhab, serta menyetujui narasi pendirian negara berbasis ideologi tunggal (Hasan, 2020: 143; Arifianto, 2019: 82).

Penetrasi paham radikal ini terjadi melalui jalur-jalur yang sangat terstruktur maupun informal:

a. Infiltrasi Kegiatan Ekstra-Kurikuler: Jaringan kelompok puritan-ekstrem sering kali memanfaatkan kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) di sekolah menengah umum yang lepas dari pengawasan ketat kepala sekolah dan guru PAI resmi (Hasan, 2020: 148).

b. Literasi Digital yang Unfiltered: Anak muda mengonsumsi potongan ceramah propaganda ekstremis yang membenturkan nilai keagamaan dengan konsensus nasional (Pancasila dan NKRI) secara masif di platform TikTok, YouTube, dan Telegram (Syarif, 2023: 58).

2. Kelemahan Metodologis Pembelajaran PAI Konvensional

Akar masalah dari kerentanan peserta didik terhadap paham radikal terletak pada kelemahan metodologis dalam pengajaran PAI konvensional. Selama ini, PAI cenderung diajarkan dengan metode dogmatis-tekstual (*indoctrination*) dan penekanan berlebih pada hafalan (*rote learning*) tanpa disertai proses pembuktian rasional dan dialog interaktif (Subakti, 2021: 90; Muqoyyidin, 2022: 118).

Siswa dituntut menghafal dalil-dalil hukum Fiqh atau teks ayat Al-Qur'an tanpa diajak memahami *asbab al-nuzul* (latar belakang historis turunnya ayat), *asbab al-wurud* (konteks sejarah Hadis), serta prinsip *maqasid al-shari'ah* (tujuan utama penetapan hukum Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Akibatnya, ketika siswa dihadapkan pada klaim-klaim keagamaan radikal yang mengutip ayat-ayat perang (*ayat al-saif*) secara parsial dan literal di internet, mereka tidak memiliki ketahanan kognitif dan tameng metodologis untuk menepisnya (Subakti, 2021: 94).

3. Konstruksi Moderasi Beragama (*Wasathiyyah*) dalam Pembelajaran

Guna mengkonter arus radikalisme tersebut, Kementerian Agama bekerjasama dengan Kemendikbudristek menetapkan penguatan Moderasi Beragama (*wasathiyyah*) sebagai arus utama (*mainstreaming*) kebijakan pendidikan nasional. Dalam kerangka kurikulum PAI, Moderasi Beragama bukanlah bentuk pemikiran kompromistis yang mendangkalkan akidah Islam, melainkan penanaman cara pandang, sikap, dan praksis beragama yang mengambil jalan tengah, adil, berimbang (*tawazun*), serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal (Subakti, 2021: 98; Muqoyyidin, 2022: 122).

Reorientasi kurikulum PAI berbasis Moderasi Beragama harus diintegrasikan ke dalam empat pilar indikator utama:

1. Komitmen Kebangsaan: Menanamkan kesadaran bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus final bangsa yang sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai syariat Islam (*mu'ahadah wataniyyah*).
2. Toleransi: Mengembangkan sikap menghargai kesetaraan dan hak-hak sipil sesama warga negara tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan mazhab keagamaan.
3. Anti-Kekerasan: Menolak tegas penggunaan cara-cara kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun simbolik, dalam memperjuangkan aspirasi keagamaan.
4. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal: Mengajarkan sikap terbuka terhadap tradisi dan kearifan lokal (*urf*) selama tidak bertentangan secara prinsipil dengan akidah Islam, sejalan dengan metode dakwah Wali Sanga.

C. Disrupsi Teknologi, AI, dan Pergeseran Otoritas Keagamaan

1. Fenomena 'Ustaz Algoritma' dan Populisme Agama Digital

Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 melahirkan disrupsi teologis dan sosiologis yang sangat masif bagi PAI. Hadirnya platform media sosial (TikTok, Instagram, YouTube) yang dikendalikan oleh algoritma komersial telah melahirkan fenomena 'Ustaz Algoritma' dan populisme agama digital (Syarif, 2023: 54; Campbell, 2021: 108). Otoritas keagamaan tradisional—yang secara historis dibangun di atas fondasi kedalaman penguasaan kitab kuning, sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah ﷺ, kelulusan dari institusi pesantren/universitas ternama, serta integritas moral-spiritual (*khasyyah*)—kini mengalami dekonstruksi radikal.

Di ruang publik digital, otoritas keagamaan diukur berdasarkan indikator-indikator kuantitatif sekuler: jumlah *followers*, tingkat *engagement*, keviralan konten, serta kemasan visual yang dramatis. Penceramah-penceramah populer yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Islam yang sahih sering kali mendominasi linimasa media sosial dengan narasi keagamaan yang mengedepankan klaim 'hitam-putih', mudah mengkafirkan (*takfir*i), dan menyederhanakan problematika Fiqh yang sangat kompleks (Syarif, 2023: 60). Generasi Z dan Alpha yang tumbuh sebagai *digital natives* lebih menyukai konten-konten agama instan berdurasi 30 detik ketimbang mengkaji literatur Islam yang otentik.

2. Kecerdasan Buatan (*Generative AI*) dan Tantangan Pendidik PAI

Tantangan disrupsi ini mencapai puncaknya dengan lompatan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI) berwujud *Generative AI* (seperti ChatGPT, Claude, dan Chatbot Fatwa AI). Saat ini, peserta didik dapat memperoleh jawaban atas persoalan hukum Fiqh, tafsir Al-Qur'an, hingga konseling etis-moral hanya dengan mengetikkan perintah (*prompt*) kepada sistem AI dalam hitungan detik (Fahrudin, 2022: 198; Holmes, 2022: 45).

Meskipun AI memberikan efisiensi akses informasi yang luar biasa, teknologi ini menyimpan bahaya laten teologis dan metodologis:

a. Ketidakberadaaan Sanad dan Ruhiyyah: AI adalah mesin pemroses bahasa (*large language models*) yang bekerja berdasarkan probabilitas statistik data, tanpa memiliki empati spiritual, *khasyyah* (rasa takut kepada Allah), dan sanad keilmuan yang valid (Fahrudin, 2022: 202).

b. Halusinasi AI dan Bias Informasi: AI berpotensi menghasilkan jawaban fatwa hukum yang salah, mengutip Hadis palsu (*maudhu'*), atau terjebak dalam bias dataset Barat yang sekuler.

c. Dehumanisasi Peran Guru: Jika guru PAI di kelas masih mengajar dengan metode konvensional—yaitu sekadar mendiktekan materi kognitif atau meminta siswa membaca buku teks—posisi guru akan sepenuhnya digantikan oleh teknologi AI (Holmes, 2022: 52). Guru PAI dituntut bertransformasi dari penyampai informasi menjadi pembimbing etis (*spiritual mentor*) dan pengasah nalar kritis.

3. Urgensi Formulasi Pedagogi Digital Kritis

Guna merespons gelombang disrupsi ini, PAI harus mentransformasikan pendekatan pembelajarannya menuju 'Pedagogi Digital Kritis' (*Critical Digital Pedagogy*). Melalui pendekatan ini, kelas PAI difungsikan sebagai laboratorium verifikasi dan dekonstruksi muatan digital (Fahrudin, 2022: 205; Syarif, 2023: 62). Guru PAI harus melatih peserta didik dengan tiga keterampilan utama:

a. Literasi Tabayyun Digital: Kemampuan melakukan verifikasi silang (*cross-checking*) terhadap fakta, sanad, dan kesahihan narasi agama yang viral di media sosial atau dihasilkan oleh AI.

b. Analisis Bias Algoritma: Memahami bahwa algoritma media sosial dirancang untuk memicu emosi dan kontroversi demi keuntungan bisnis (*attention economy*), bukan demi menyampaikan kebenaran keagamaan yang sahih.

c. Adab Keilmuan Digital: Mengajarkan etika beragama di internet, menolak penyebaran *hoax*, serta menjaga rasa hormat (*adzab*) terhadap otoritas ulama dan guru meskipun teknologi AI telah tersedia secara gratis.

D. Sekularisasi, Komodifikasi, dan Pragmatisme Pendidikan Islam

1. Komodifikasi dan Neoliberalisme Pendidikan Islam

Isu kritis lain yang melukai penyelenggaraan pendidikan Islam adalah maraknya penetrasi ideologi Neoliberalisme dan komodifikasi pendidikan. Dalam dua dekade terakhir, tumbuh pesat fenomena sekolah-sekolah Islam swasta berlabel *Integrated Islamic School* (SDIT/SMPIT/SMAIT) dan *International Islamic Boarding School* di kawasan perkotaan (Rahman, 2021: 177; Apple, 2019: 138). Di satu sisi, fenomena ini mencerminkan kebangkitan kelas menengah Muslim (*Muslim middle class*) yang memiliki kesadaran tinggi untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

Namun, di sisi kritis, komersialisasi ini mematok biaya finansial yang sangat tinggi, sehingga hanya dapat diakses oleh kelompok elit ekonomi. Fenomena ini memicu stratifikasi sosial dan komodifikasi agama: pendidikan Islam diperjualbelikan sebagai 'barang komoditas mewah'. Akibatnya, PAI kehilangan misi sosio-profetik aslinya yang diwariskan oleh Nabi Muhammad ﷺ, yaitu sebagai sarana emansipasi sosial, pemerataan keadilan, dan pembelaan terhadap kaum tertindas (*al-mustad'afin*) (Rahman, 2021: 182; Hanafi, 2018: 95).

2. Pragmatisme Pembelajaran dan Pengikisan Ruh Spiritual



Pragmatisme pendidikan tampak nyata ketika orientasi PAI di sekolah-sekolah formal terjerembap ke dalam formalisme administratif. PAI dievaluasi dan diukur hanya berdasarkan skor ujian tertulis pilihan ganda (*multiple choice test*), pencapaian angka pada rapor, dan pemenuhan dokumen akreditasi (Abdullah, 2020: 101). Pembelajaran PAI diperlakukan mekanis seperti mata pelajaran hafalan lainnya, di mana siswa diukur dari sejauh mana mereka mampu mengingat definisi hukum atau riwayat sejarah. Pendekatan mekanis-pragmatis ini mengikis ruh spiritualitas (*ruhiyyah*), keikhlasan (*ikhlas*), kesederhanaan (*zuhud*), dan pembentukan akhlak mulia yang menjadi jantung tarbiyah Islam. Hasilnya adalah tragedi moralitas: peserta didik mampu meraih nilai A dalam mata pelajaran PAI, namun tidak memiliki rasa segan untuk melakukan kecurangan saat ujian, terlibat tawuran, melakukan perundungan (*bullying*), atau menampilkan kebiasaan koruptif dalam kehidupan sehari-hari (Rahman, 2021: 188; Abdullah, 2020: 105).

E. Kebijakan Kurikulum PAI dan Profesionalisme Pendidik

1. Evaluasi Kebijakan Kurikulum Nasional Kontemporer

Dinamika pergantian kurikulum di Indonesia—dari KBK (2004), KTSP (2006), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka membawa konsekuensi langsung terhadap porsi dan posisi PAI di sekolah umum. Dalam penerapan Kurikulum Merdeka, pemerintah memperkenalkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang mengusung fleksibilitas pembelajaran berbasis projek. Namun, dalam tataran praksis di lapangan, alokasi jam tatap muka (intrakurikuler) PAI kerap dirasa sangat minim (2–3 jam per minggu) untuk mencakup lima sub-komponen keilmuan Islam yang amat luas (Subakti, 2021: 102). Guru PAI sering kali terburu-buru mengejar ketuntasan materi tanpa memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pembimbingan akhlak dan konseling spiritual secara mendalam.

2. Problematika Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru PAI

Tantangan kurikuler tersebut diperberat oleh problematika klasik yang dihadapi oleh pendidik PAI: isu kesejahteraan dan kualifikasi profesionalisme. Di berbagai daerah, khususnya di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta sekolah-sekolah swasta pinggiran, masih banyak guru PAI yang berstatus honorer dengan honorarium jauh di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) (Subakti, 2021: 106). Kondisi keterbatasan sosio-ekonomi ini menghambat guru PAI untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya, membeli literatur mutakhir, atau mengikuti pelatihan teknologi digital.

Di samping itu, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi pendidik sering kali terjebak dalam jebakan birokratisasi administratif. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan masih dominan berfokus pada penyusunan dokumen RPP/Modul Ajar formalistis, ketimbang penguasaan literasi AI, metode pengajaran interdisipliner, dan penguatan metodologi teologi moderat (*usul al-din*) (Subakti, 2021: 110). Akibatnya, ketimpangan antara tuntutan profesionalisme abad ke-21 dengan realitas kompetensi guru PAI di lapangan masih sangat lebar.

F. Strategi Transformatif dan Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam

1. Praksis Pembelajaran PAI Integratif-Interkonektif

Rekonstruksi PAI diawali dengan meruntuhkan tembok dikotomi keilmuan melalui praksis pembelajaran integratif-interkonektif di kelas. Guru PAI tidak boleh lagi menyampaikan materi agama secara doktriner yang terisolasi dari sains. Sebagai contoh konkret, ketika mengajarkan materi *Fiqh Thaharah* (bersuci) atau *Fiqh al-Bi'ah* (fikih lingkungan), guru harus menyambungkannya dengan sains krisis iklim global, ilmu sanitasi kesehatan publik, dan konsep ekologi modern (Naim, 2021: 98; Abdullah, 2020: 130). Siswa diajak memahami bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian alam bukan sekadar tugas sosiologis, melainkan amanah khilafah Ilahiah yang berdimensi pahala eskatologis.

Sejalan dengan itu, lembaga pendidikan harus mendorong kolaborasi mengajar (*team teaching*) antara guru PAI dengan guru IPA/IPS. Pembelajaran materi Sejarah Peradaban Islam (SPI) misalnya, diintegrasikan dengan analisa sosiologi-ekonomi mengenai kemunduran peradaban, sementara materi *Ayat-Ayat Kauniyyah*



diajarkan bersamaan dalam praktikum laboratorium fisika dan astronomi (Naim, 2021: 104). Melalui strategi ini, PAI hadir sebagai ilmu yang rasional, empiris, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban.

2. Desain Kurikulum Literasi AI dan Digital Keagamaan

Guna memenangkan pertarungan di era disrupsi digital, Kementerian Agama dan Kemendikbudristek perlu merumuskan kerangka 'Kurikulum Literasi AI Keagamaan' (*Islamic AI Literacy*) yang terintegrasi dalam mata pelajaran PAI. Poin-poin strategis dalam desain kurikulum ini meliputi:

a. *Fact-Checking and Tabayyun Digital*: Pelatihan metode penelitian keagamaan digital, di mana siswa diajarkan cara melacak kesahihan riwayat Hadis, memverifikasi sanad fatwa, dan mendeteksi narasi *hoax* keagamaan yang dihasilkan oleh AI atau media sosial.
b. *Prompt Engineering* Berbasis Etika Islam: Mengajari siswa cara menyusun perintah (*prompt*) yang presisi dan kritis kepada sistem AI untuk mencari literatur Fiqh atau sejarah Islam, dengan tetap menjaga kesadaran bahwa AI hanyalah alat bantu (*tool*), bukan ulama yang memiliki otoritas fatwa (Fahrudin, 2022: 210).
c. Etika Siber dan Moderasi Konten: Mendorong siswa untuk aktif menjadi produsen konten keagamaan moderat yang kreatif di media sosial (TikTok, Instagram, YouTube) sebagai bagian dari dakwah *bil-qalam* dan *bil-ra'yi* di ruang digital (Syarif, 2023: 65).

3. *Internalizing Wasathiyyah*: Praksis Kebajikan Sosio-Religius

Penguatan Moderasi Beragama dalam PAI harus digerakkan dari sekadar teori di atas kertas menjadi 'Praksis Kebajikan Sosio-Religius' (*Socioreligious Virtues in Action*). Pembelajaran PAI tidak boleh terkurung di dalam dinding-dinding kelas yang steril dan homogen. Sekolah harus merancang program 'Ruang Dialog dan Kolaborasi Lintas Iman' (*Interfaith and Cross-Cultural Experiential Learning*) (Subakti, 2021: 108; Muqoyyidin, 2022: 125).

Dalam program ini, peserta didik Muslim diajak bergotong royong dengan teman-teman sezaman yang berbeda agama dan suku dalam projek-projek kemanusiaan yang nyata: aksi tanggap bencana alam, gerakan penghijauan lingkungan hidup, pembagian bantuan sosial untuk masyarakat miskin, serta kampanye anti-perundungan (*anti-bullying*). Melalui pengalaman langsung ini, siswa tidak hanya menghafal konsep toleransi (*tasamuh*) dan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyyah*), melainkan merasakannya sebagai pengalaman batin yang membentuk karakter akhlak mulia mereka.

4. Kesimpulan

Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi berbagai persoalan kritis yang berkaitan dengan tantangan epistemologis, sosial-keagamaan, perkembangan teknologi, orientasi kelembagaan, serta kebijakan pendidikan. Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan keterpisahan pengetahuan yang berpotensi menghambat pembentukan cara pandang peserta didik secara utuh. Pada saat yang sama, radikalisme dan intoleransi menuntut penguatan moderasi beragama (wasathiyyah) melalui pembelajaran yang dialogis, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan akhlak. Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan media sosial juga mengubah pola akses terhadap pengetahuan keagamaan serta menantang otoritas guru dan ulama. Selain itu, komodifikasi pendidikan, pragmatisme pembelajaran, perubahan kebijakan kurikulum, dan persoalan kesejahteraan guru turut memengaruhi pelaksanaan PAI. Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan PAI tidak hanya terletak pada materi pembelajaran, tetapi juga pada paradigma keilmuan, metode pedagogis, tata kelola kelembagaan, dan orientasi nilai yang mendasarinya.

Oleh karena itu, rekonstruksi PAI perlu diarahkan pada pengembangan paradigma integrasi-interkoneksi yang menghubungkan wahyu, ilmu pengetahuan, teknologi, dan realitas sosial secara dialogis. Penguatan moderasi beragama perlu diwujudkan melalui penanaman toleransi, komitmen kebangsaan, penolakan terhadap kekerasan, serta penghargaan terhadap kebudayaan lokal yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam menghadapi perkembangan AI, guru PAI perlu mengembangkan pedagogi digital kritis dengan menekankan literasi digital keagamaan, verifikasi informasi (tabayyun), pemeriksaan sumber, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Pendidikan Islam juga perlu mengembalikan pembentukan akhlak, spiritualitas, keikhlasan,

dan keadilan sosial sebagai orientasi utama, bukan sekadar pencapaian nilai akademik atau pemenuhan administrasi. Upaya tersebut harus didukung oleh kebijakan kurikulum yang adaptif, peningkatan kompetensi profesional guru, kesejahteraan pendidik, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, PAI diharapkan mampu mempertahankan fondasi nilai-nilai Islam sekaligus merespons perkembangan zaman secara kritis, inklusif, dan transformatif.

5. Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin. (2020). Multidisplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Proses Tembus Batas Pendekatan Studi Islam. Yogyakarta: IB Times.

Apple, Michael W. (2019). Ideology and Curriculum (4th ed.). New York: Routledge.

Arifianto, Alexander R. (2019). Islamic Campus Preaching and Radicalism in Indonesia: A Study of Rohis in Public High Schools. Asian Survey, 59(5), 78-98.

Azra, Azyumardi. (2020). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium Baru. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Campbell, Heidi A. (2021). Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Worlds (2nd ed.). London: Routledge.

Fahrudin, A. (2022). Pedagogi Digital dalam Pembelajaran Agama Islam di Sekolah Menengah: Tantangan Era Artificial Intelligence. Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer, 14(2), 195-215.

Hanafi, Hassan. (2018). Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat (Terj. M. Ridwan). Jakarta: Paramadina.

Hasan, Noorhaidi. (2020). Literasi Keagamaan, Generasi Muda, dan Pencegahan Ekstremisme di Sekolah Menengah Indonesia. Yogyakarta: LKiS.

Holmes, Wayne, & Tuomi, Ilkka. (2022). State of the Art and Practice in AI in Education. European Journal of Education, 57(1), 42-60.

Kuntowijoyo. (2018). Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika (Ed. 2). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Madjid, Nurcholish. (2019). Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan dan Modernisasi Pendidikan Islam. Jakarta: Paramadina.

Muqoyyidin, A. W. (2022). Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme di Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Edukasi Islam, 10(1), 110-130.

Naim, Ngainun. (2021). Rekonstruksi Pendidikan Islam: Menuju Integrasi Epistemologi dan Harmoni Sosial. Malang: Literasi Nusantara.

Nasr, Seyyed Hossein. (2018). Science and Civilization in Islam (3rd ed.). Chicago: ABC International Group.

Rahman, Fazlur. (2021). Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Tradisi Intelektual (Terj. Ahsin Mohammad). Bandung: Mizan.

Subakti, H. (2021). Strategi Internalisasi Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Umum. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarif, M. (2023). Disrupsi Digital, 'Ustaz Algoritma', dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Generasi Z. Jurnal Komunikasi dan Agama, 8(1), 45-68.

